

POSITIONING IDEOLOGI PARTAI POLITIK PADA PREFERENSI POLITIK SANTRI

Laili Bariroh

UIN Sunan Ampel Surabaya
lbariroh.20@gmail.com

Abstract

This study is conducted based on the weaknesses of political parties. It is questioning the ideology of political parties which tends to be less operational, undemocratic and – to some extent – centralized management, and the absence of accountability. Using qualitative approach, the study findsthat there are two main typologies, according to *santri* (students of Islamic boarding schools), namely pragmatic parties and parties of interests. Moreover, related to the positioning of the ideology of political parties, based on students' preferences, the students grounded their information on mass media and social media. Moreover, ideology and value system are not important aspects adopted by the students in their political preferences. To them politicians are merely groundless political actors who put less effort to fight for the sake of people's interests. In addition, the students argue that politicians put most emphasis merely on their party and themselves

Keywords: Ideological positioning, Pragmatic Party, Popularity

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada kelemahan partai politik yang ada saat ini, yaitu ideologi partai politik yang tidak operasional, pengelolaan partai tidak demokratis bahkan cenderung sentralistis, dan tidak memiliki akuntabilitas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil temuan adalah: *pertama*, terkait pemaknaan santri pada ideologi partai politik, terdapat tipologi partai pragmatis dan tipologi partai kepentingan. *Kedua*, terkait *positioning* ideologi partai politik dalam preferensi politik santri, para santri mendasarkan informasi melalui media massa dan *social media*. Ideologi dan sistem nilai bukan sesuatu yang dianut santri dalam preferensi politiknya. Politisi dilihat sebagai satu aktor politik yang kurang mengakar dan tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. Para santri melihat sebagian politisi sibuk memperjuangkan partai dan dirinya.

Kata kunci: Positioning ideologi, Partai Pragmatis, Popularitas

Pendahuluan

Pemilu 2014 diikuti oleh 12 Partai Politik yang telah lolos tahapan verifikasi KPU. Penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu ini sangat menarik untuk diamati. Hal ini disebabkan fakta bahwa jarak ideologi partai politik di Indonesia sangat sempit karena bergerak pada tiga spektrum ideologi, yaitu nasionalisme, religius, dan sosialisme. Partai peserta pemilu itu adalah peserta pemilu sebelumnya dan telah dikenal luas di masyarakat, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, PAN, PKS, PBB, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Hanura. Mereka adalah partai yang memiliki jarak ideologi seperti yang disampaikan sebelumnya.

Ideologi, bagi parpol adalah pembawa ide (Vassalo and Wilcox, 2006:79). Dalam sistem demokrasi, ideologi akan di *break down* dalam manifesto partai dan program partai akan menjadi sikap dasar partai dalam menjalankan proses pengelolaan kebijakan negara (Sugiono, 2009:3). Urgensi ideologi bagi partai berangkat dari basis dasar terbentuknya yang merupakan bentuk pengorganisasian orang-orang dengan kesamaan ide. Seperti didefinisikan Edmund Burke, Parpol adalah: *a body of man united, for promoting for the joint endeavours the national interest, upon some articular principle in which they are all agreed* (Vassalo and Wilcox, 2006:79). Dengan demikian, masing-masing parpol akan memiliki basis dasar kebijakan untuk mengelola kebijakan publik, dan basis dasar inilah yang akan dinegosiasikan dalam proses kebijakan.

Di Indonesia, parpol cenderung meletakkan basis eksistensinya pada pengelompokan sosial dan politik aliran daripada klusterisasi ideologis (Dhakidae, 1999: 5). Melihat proses politik yang berkembang selama ini, kita dihadapkan pada semangat pragmatisme yang dianut mayoritas parpol di Indonesia. Kondisi ini tentu saja hampir serupa dengan kondisi menjelang pemilu tahun 1999. Kita bisa melihat partai politik berkompetisi dan diberikan kebebasan untuk menegaskan warna

ideologinya dan pemilih tidak lagi diintimidasi dalam menentukan partai pilihannya.

Namun, sejak pemilihan umum 2004 dan sepanjang pelaksanaan pemilu pada 2005-2009, posisi ideologi politik sebuah partai seperti ini tidak memiliki arti apa-apa. Sistem pemilu yang diselenggarakan sejak era reformasi telah melahirkan puluhan partai politik yang memenuhi persyaratan *electoral threshold*. Banyaknya jumlah partai tersebut, berimplikasi pada munculnya persoalan serius akibat kaburnya batas ideologi antar partai, disebabkan baik partai kiri maupun kanan semakin bergeser ke tengah (Marijan, 2010:38). Terjadi juga pergeseran ideologi seiring dengan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia.

Pembentukan nilai ideologi partai politik sangat lemah dalam praktik politik keseharian. Partai lebih cenderung mengangkat isu populis untuk kepentingan politik praktis dari pada nilai ideologis. Implikasinya, koalisi yang terbentuk lebih berbasis pada isu pragmatis partai politik dan melupakan ideologi formal yang dimiliki. Fenomena yang terdapat di Indonesia saat ini adalah berlomba-lombanya partai politik untuk menginklusifkan diri dan mewartakan semua basis pemilih, sedangkan ideologi partai tidak lagi menjadi variabel sentral dalam pembuatan keputusan di internal partai (Simbolon, 2006:48). Ini merupakan sebuah fenomena menarik, ketika partai berbasis religius (Islam) dan merupakan partai doktriner, semakin mendekati diri dan terbuka pada partai berideologi sekuler ataupun nasionalis sehingga menjadi partai yang pragmatis.

Fenomena yang terjadi dalam tatanan kehidupan partai politik Indonesia tersebut, bukan saja membuat rakyat kesulitan melihat perbedaan kontinum partai kiri-kanan, namun yang lebih esensial adalah semakin jauh jarak partai itu sendiri dari basis historis pendiriannya. Sehingga perlu dipertanyakan lagi konsistensi ideologi partai sebagai basis perjuangan partai. Wilayah keyakinan atas nilai-nilai yang akan diperjuangkan

melalui suatu sistem kekuasaan menjadi semakin sempit, tidak variatif, dan mereduksi peluang kompetisi pencarian alternatif-ideologis. Kepercayaan masyarakat kepada partai-partai yang membawa ideologi sebagai asas perjuangan partainya, misalnya saja partai berbasis islam semakin berkurang. Hal ini disebabkan semakin kecilnya perolehan jumlah suara yang didapatkan sebagian besar partai-partai islam selama pemilu beberapa tahun belakangan.

Di sisi lain, tradisi Islam merupakan salah satu faktor pembentuk ideologi partai. Sebagai tradisi, Islam di Indonesia tidak tunggal dan ini menyebabkan keberagaman ekspresi ideologis Islam, baik tradisi maupun hasil adaptasi dengan kebudayaan lain. Kelompok santri, dalam peta perilaku pemilih, bisa diklasifikasikan sebagai kelompok tradisional (Firmanzah, 2008:67) yang seringkali mendasarkan preferensi politiknya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kultural serta pola hubungan *clientilistic*. Namun, terbelahnya afiliasi politik kyai pada politik partisan tentu menimbulkan persoalan berkenaan dengan sikap kaum *santri* yang sebelumnya dikenal memiliki respekasi dan ketaatan tinggi pada kyai. Perkembangan sosial dan politik negeri ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat Islam semakin independen dalam menentukan pilihan afiliasi politiknya.

Perbedaan afiliasi politik kyai juga bukan mustahil menimbulkan respon beragam dari komunitas masyarakat yang sebelumnya menempatkan kyai sebagai *opinion leader* (Niemi and Weisberg, 1990:29), ataupun referensi utama pengambilan keputusan yang harus ditaati. Situasi ini potensial menjadikan kyai dalam konotasi dan lingkup pengaruh kulturalnya yang khas, sebagaimana identifikasi Bruinessen berubah dari sebelumnya (Martin and Bruinessen, 1994:48).

Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa pemilik massa pemilih (baca: santri) dalam kontestasi politik? Tidak bertuan alias mengambang ataukah terikat pada hubungan emosional dan rasional dengan ideologi tertentu? Jika melihat ke-

cenderung pelaku kontestasi politik dalam pemilihan kepala daerah -gubernur, bupati, walikota atau pemilihan presiden, agaknya mereka masih sangat yakin massa pemilih itu “milik” ideologi, komunitas dalam entitas tertentu. Oleh sebab itu, para kandidat haruslah dapat menyatakan diri sebagai bagian dari “pemilik” massa pemilih itu. Dengan begitu, harapan meraup suara melalui pilihan yang didasarkan pada ikatan emosional terhadap ideologi atau komunitas tertentu menjadi sangat terbuka.

Di Jawa Timur, anomali politik terjadi di Jombang yang sering disebut sebagai kota santri. Tentu saja menjadi sangat menarik untuk menelaah keterkaitan antara tradisi keislaman yang menjadi setting sosio-kultural berbasis religius pada diri santri. Pesantren Tebuireng dipilih karena beberapa faktor: *pertama*, merupakan salah satu pesantren tertua yang menjadi salah satu rujukan utama santri dari berbagai daerah sehingga diasumsikan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif untuk melihat pereferensi politik santri. *Kedua*, Pondok Pesantren Tebuireng adalah pondok pesantren terpadu yang mengembangkan pendidikan semi salaf dan semi khalaf dan mengembangkan pendidikan multikulturalisme, inklusif, serta modern sehingga bisa diklasifikasikan sebagai generasi baru kelompok santri Indonesia.

Apabila selama ini, santri selalu diasumsikan sebagai kelompok tradisional dalam tipologi pemilih. Benarkah hal seperti itu yang terlihat dalam dinamika perilaku massa pemilih yang berasal dari kelompok santri di Tebuireng, Jombang? Apakah mereka masih kukuh memilih calon dengan pertimbangan ikatan dan kedekatan emosional ideologi yang dimiliki partai politik? atau justru mereka memiliki pertimbangan lain dalam menentukan preferensi politiknya? Di tengah pusaran politik yang sangat pragmatis, bagaimana struktur berpikir santri dalam menentukan pilihan politik, terutama pada Pemilu 2014 nanti?

Pemaknaan Santri Pada Ideologi Partai Politik

1. Tipologi Partai Politik Pragmatis

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi (Schattscheider, 1942:89). Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, “*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*”.

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih dari kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan ‘nafsu birahi’ kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung karena berhasil memenangkan suara rakyat, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu ‘*at the expense of the general will*’ atau kepentingan umum.

Dalam kehidupan demokrasi seperti yang ada di Indonesia, partai politik merupakan instrumen yang harus ada. Bahkan pendapat ekstrim mengatakan bahwa tidak ada demokrasi tanpa partai politik, karena partai politik memainkan peran strategis dalam sistem demokrasi. Adanya partai politik akan menyebabkan masyarakat merasa mempunyai negara/pemerintah. Hal ini disebabkan apabila tidak ada kekuatan yang menjadi penyeimbang penguasa, maka kekuasaan akan cenderung disalahgunakan dan masyarakat pasti akan di-

rugikan melalui kebijakan-kebijakannya. Peran strategis dan harapan besar terhadap partai politik ini disampaikan oleh Samsul Arifien,

“Melalui partai politik, seharusnya kita bisa membuka perubahan melalui rekrutmen yang dilakukankan pintu masuknya semua posisi penting di Negara ini kan dari partai politik. Kalau nggak masuk partai, mana mungkin bisa jadi anggota DPR. Lha ini kan membuktikan bahwa peran partai sangat besar untuk proses demokrasi. Kalau partainya baik, yang dihasilkan juga pasti baik. Jadi, nanti bisa mengontrol pemerintah dengan baik pula. Begitu juga sebaliknya.” (Samsul Arifien, *Wawancara*, 3 November 2013)

Idealnya, partai politik bisa memberikan kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil pada anggotanya, sebagaimana yang disampaikan oleh M. Ali Subhan,

“Saya membayangkan partai politik adalah organisasi yang bisa teratur, menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga tidak saja memberi manfaat untuk anggotanya, tapi juga memberi manfaat untuk masyarakat luas. Caranya, ya dengan sungguh-sungguh menjalankan program kerjanya yang memberikan manfaat luas pada masyarakat, tanggap pada persoalan masyarakat, memberi tauladan yang baik, tidak menciptakan konflik di masyarakat, tapi justru bisa memberikan alternatif penyelesaian apabila ada persoalan di masyarakat. Kalau seperti ini, maka kita bisa mempercayai partai politik yang ada.” M.Ali Subhan, *Wawancara*, 3 November 2013)

Sigmund Neumann dalam buku *Pengantar Ilmu Politik*, menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktifis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Dari konsep tersebut, kita mengetahui bahwa partai politik adalah organisasi hasil bentukan masyarakat dengan dasar

kepercayaan tentang nilai-nilai tertentu terkait masyarakat yang dicita-citakan.

Di sisi lain, institusi yang bisa berjalan secara efektif, sangat bergantung dari aktor-aktor yang menjalankan sistem di internal partai politik sehingga sangat diperlukan orang-orang yang memiliki kapabilitas, integritas tinggi, serta tidak mengandalkan popularitas dan pencitraan yang terkadang justru bersifat semu.

Namun, dalam perspektif santri, partai politik yang ada di Indonesia masih jauh dari idealisme di atas, sebagaimana pernyataan di bawah ini,

“Ya itu dia. Kayaknya masih jauh... mereka hanya mikirin kebutuhannya sendiri, masyarakat dibiarkan menderita dan miskin. Makanya, partai agama atau partai nasionalis, semuanya sama saja. Yang dipikirin mah perutnya sendiri. Itu mungkin yang bikin mereka korupsi.” (Muhammad Ghiffari, *Wawancara*, 11 November 2013)

Pernyataan ini bisa dimaknai sebagai ungkapan ketidakmampuan partai politik menjalankan fungsinya sebagai pemandu kepentingan, sehingga kepentingan masyarakat menjadi terabaikan.

Pasca Reformasi, jumlah partai politik yang makin banyak membawa implikasi kebingungan dalam masyarakat untuk memilih partai mana yang dipercaya dapat memperjuangkan atau mewujudkan kepentingannya. Hal ini juga disampaikan oleh Muhammad Ghiffari,

“Terus terang ini pengalaman pertama saya, jadi saya masih sangat awam. Jujur saya bingung mau memilih partai apa. Kok kalo saya lihat di televisi, gak ada partai yang bener ya?semuanya pasti ada konflik, kena korupsi. Ada partai yang selama ini dikenal partai agama, tapi juga gak jelas apa yang dilakukan untuk agama. Mereka malah ikut-ikutan korupsi, main perempuan. Ini lho yang buat saya bingung. Aneh aja ngeliatnya, kadang-kadang saya suka geli sendiri. Dulu saya mikir, kalo yang namanya partai agama, ya berarti dilandasi agama, eh gak taunya

ikut korupsi juga. Lha sekarang, agama mana yang memperbolehkan umatnya korupsi? Kayaknya kan gak ada, apalagi Islam. Wah, jelas-jelas dilarang itu... tapi kok partai agama korupsi juga. Partai nasionalis juga gitu, gentian aja yang ketangkap korupsi. Ini kan berarti mereka gak ada bedanya..." (Muhammad Ghiffari, *Wawancara*, 11 November 2013)

Praktek-praktek yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia sebenarnya menunjukkan adanya jarak yang lebar antara ideologi yang tertuang di dalam AD/ART partai dengan program kerja yang dijalankan. Pada tataran teoritis, partai politik bersaing dengan ideologi yang termanifestasikan ke dalam kebijakan partai dan selanjutnya muncullah program partai. Program-program tersebutlah yang kemudian menjadi aksi nyata dan dapat diamati dalam mengimplementasikan masyarakat yang dicita-citakan. Partai politik hadir dengan menawarkan berbagai program yang diyakini akan mampu menyelesaikan persoalan bangsa ataupun akan memperjuangkan sesuatu bagi masyarakat banyak sesuai dengan ideologi yang diyakininya.

2. Tipologi Partai Politik Kepentingan

Pada bagian sebelumnya, telah ditemukan pragmatisme partai politik dalam menjalankan fungsinya di masyarakat. Adanya pergeseran fungsi dan nilai partai politik yang diikuti oleh lunturnya ideologi dan loyalitas anggota atau konstituen partai, mengakibatkan kebanyakan anggota partai kemudian berpindah ke partai lain untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dan sebagai bentuk pengaktualisasian diri. Hal tersebut disampaikan oleh M. Ali Subhan,

"Di lapangan, kita bisa temukan bagaimana orang dengan mudahnya pindah-pindah partai, hari ini di Golkar, besok di Demokrat, nggak tahu lagi besok akan nyangkut kemana. Ini kan jelas, mereka nggak punya prinsip. Mereka hanya mencari lahan yang menguntungkan mereka. Di Golkar gak

bisa dapat kedudukan baik, ya melirik partai lain yang bisa memberi dia tempat dan kedudukan jauh lebih baik. Kedudukan lebih baik kan juga pasti diimbangi dengan pendapatan yang juga pasti akan berlipat ganda. Makanya, sekarang ini orang nggak lihat, darah partai itu apa, nasionalis, agama, atau apa. Yang dilihat cuma, partai mana yang bisa menampung kepentingan orang itu. Gak peduli isinya adalah orang-orang yang sebenarnya adalah lawannya.” (M. Ali Subhan, *Wawancara*, 3 November 2013)

Alasan seseorang memilih untuk berpindah partai secara personal adalah munculnya kekecewaan terhadap partai lamanya, karena ada indikasi partai lama kurang bisa menjalankan fungsi-fungsi partai, gagal menjalankan manajemen institusi, serta cenderung mengejar kekuasaan semata.

Dalam konteks manajemen partai politik, manajemen berarti partai politik melakukan pengelolaan seperti *planning, organizing, controlling, dan evaluating* secara benar sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran rumah Tangga (ART). Maka, perpindahan partai politik tersebut menjadi langkah nyata kekecewaan mereka terhadap partai lama dan menunjukkan sikap oportunistis yang cenderung mengejar jabatan dan kekuasaan. Fenomena ini juga sekaligus membuktikan bahwa ideologi partai politik dalam perspektif anggotanya bersifat sangat cair.

Masyarakat Indonesia yang mempunyai ciri sebagai masyarakat kolektif, memberikan reaksi terhadap perbedaan pendapat yang terjadi antara partai-partai tersebut sebagai “*negative public mood*” (pengalaman perasaan negatif dalam kehidupan politik setiap harinya). Sehingga muncul pandangan negatif terhadap partai-partai politik tersebut seperti disampaikan oleh Irfan Abdul Mu’thi,

“Kalo saya, kayaknya keegoisan petinggi negara. Banyak terjadi rebutan jabatan. Coba bayangkan, pas lebaran

kemarin, perjalanan saya dari Jombang ke Sukabumi, saya terus-terusan melihat baliho bertebaran yang memasang nama caleg. Dalam hati saya bertanya, buat apa memasang gambar besar-besar seperti itu?Kenyataannya gambar itu gak memberi pengaruh pada masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan pemimpin yang bisa memberi pengaruh positif, nggak Cuma gambar-gambar yang isinya Cuma janji-janji itu...saya juga gak kenal dengan mereka, jadi buat apa milih mereka?" (Irfan Abdul Mu'thi, *Wawancara*, 15 November 2013)

Dari statemen diatas, nampak sekali bahwa kerja nyata partai politik belum bisa dirasakan oleh masyarakat dan membentuk pemahaman negatif terkait kerja-kerja partai politik yang bersifat artifisial semata, yakni demi politik pencitraan yang dibangun.

Kondisi faktual di tubuh partai politik terjadi karena beberapa hal, antara lain disebabkan tidak operasionalnya ideologi partai politik dalam program kerja yang nyata sehingga sulit mengidentifikasi ideologi sebuah partai apabila didasarkan pada program kerjanya semata. Kenyataan bahwa belum operasionalnya ideologi partai politik dalam program kerja partai menjadi tak terbantahkan.

Fenomena bahwa perbedaan partai politik di Indonesia sudah semakin kabur, disebabkan juga karena tidak adanya perbedaan ekstrim antar partai politik akibat jarak ideologi partai yang sangat sempit. Selain itu juga dipengaruhi basis massa yang akan dibidik, misalnya walaupun beraliran nasionalis. Namun, ingin membidik kelompok Islam untuk mendulang suara, sehingga memaksa untuk membuat organisasi keagamaan (Islam) yang terafiliasi dengan partai tersebut seperti yang disampaikan oleh M. Irfan Yusuf,

"Kita lho sering kedatangan tokoh-tokoh partai ke Tebuireng. Ya mereka sih selalu mengatakan bahwa kedatangan mereka dalam kaitan silaturahmi dengan

pengasuh pesantren, atau sebagai bentuk ta'dhim terhadap Kyai. Ada juga yang mengatakan kalau mereka ingin berziarah ke makam kyai-kyai besar. Tapi, tentu saja ini dilakukan untuk menarik simpati kalangan pesantren. Targetnya ya pasti bisa mendulang suara dari kami.” (M. Irfan Yusuf, *Wawancara*, 2 Desember 2013)

Koalisi partai-partai politik yang dilakukan sifatnya jangka pendek, yaitu bagaimana mendapatkan kekuasaan. Seharusnya, arah koalisi partai politik dilandasi oleh ideologi partai yang kemudian menjadi identitas yang termanifestasi pada program partai tetapi yang terjadi adalah partai apapun dimungkinkan melakukan koalisi selama hal itu menguntungkan.

Pergeseran peran ideologi, yang seharusnya dijadikan landasan partai politik beserta kadernya dalam melakukan kerja-kerja politik yang menyangkut banyak hal, Kenyataannya ideologi dijadikan *content* pencitraan yang manipulatif. Ideologi kemudian hanya menjadi aksesoris partai politik dan dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek elit-elit partai politik dalam mengejar kepentingan pribadi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya elit partai politik berpindah dari satu partai ke partai lain. Ideologi tidak bisa mengikat perilaku elit partai politik. Sebaliknya, perilaku elit tidak bisa mencerminkan ideologi partai politik, baik melalui tindakan asusila, korupsi, atau kebijakan yang bertentangan dengan ideologi partai ketika ia menjadi pejabat negara. Hal ini juga ditangkap oleh Irfan Abdul Mu'thi,

“Maksud saya begini, kalau orang berpolitik, ya ga usah membawa-bawa nama agama. Agama itu mah jadi norma yang menyemangati aja. Itu mah sudah cukup. Jangan dibawa-bawa dan dipake untuk menutupi kepentingan dan kenakalannya, Lha kalo ini kan beda bu, partainya ngaku partai Islam, tapi apa yang dilakukan gak ada bedanya dengan partai-partai lain. Harusnya, kalo ngaku partai Islam, kan berlaku jujur, adil, kan itu yang diajarkan Islam.

Jadi antara omongan dan kenyataan konsisten.” (Irfan Abdul Mu’thi, *Wawancara*, 2 Desember 2013)

Tentunya fenomena ini menyulitkan untuk mendapatkan calon yang tepat, bukan karena keterbatasan informasi, tetapi karena banyaknya informasi yang ditawarkan tokoh dengan pencitraannya melalui media yang ada. Inkonsistensi partai mengimplementasikan ideologynya juga diungkapkan oleh Abdullah Rois,

“Sejauh ini, sih belum. Gak ada partai yang berideologi dan konsisten dengan ideologinya. Mereka cuma konsisten mempertahankan citranya. Bahkan kadang-kadang harus menghalalkan segala cara biar citranya bagus. Dipermak sedemikian rupa, gitu.” (Abdullah Rois, *Wawancara*, 2 Desember 2013)

Pandangan negatif publik terhadap partai politik, pada akhirnya membuat publik menjadi kurang atau tidak puas dengan kinerja partai politik. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya pemberitaan negatif mengenai partai politik di media massa dan reaksi ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap kinerja, peran, dan fungsi partai politik. Peran media massa diungkapkan oleh beberapa informan dalam mengemas berita yang tidak sepenuhnya diungkapkan kebenarannya. Irfan Abdul Mu’thi menjelaskan,

“Ya Bu, saya sudah sedikit mengetahui partai-partai yang akan ikut pemilu meskipun saya gak hafal satu-satu. Saya pengetahuannya terbatas, karena hanya dari koran, internet yang kadang-kadang banyak menutup-nutupi permasalahan yang ada. Saya kok melihat kalau media massa itu cenderung menceritakan sesuatu yang bukan semestinya, kadang-kadang malah berpihak pada kelompok politik tertentu. Yah, wajar saja Bu, karena media kan kadang-kadang dimiliki oleh orang-orang partai. Jadi, partai sering berkompromi dengan media untuk menutupi persoalan sesungguhnya. Ini yang menyebabkan masyarakat seringkali dibohongi karena media massa hanya menceritakan sedikit saja, yang lain banyak yang ditutup-tutupi.

Sedangkan saya hidup di pesantren, saya kan taunya dari media massa, jadi tidak bisa melihat kenyataan yang sebenarnya. Pengetahuan saya jadinya terbatas Bu, karena saya tidak terlalu bisa melihat secara langsung apa yang sesungguhnya terjadi.” (Irfan Abdul Mu’thi, *Wawancara*, 2 Desember 2013)

Motif politik pemberitaan media massa dimaknai sebagai bagian dari kepentingan politik yang ada pada media massa yang banyak dikuasai oleh para politisi, sehingga media massa pada hakikatnya menjadi alat pemuas kepentingan politisi. Konspirasi media dengan politisi ini ternyata sangat efektif dalam *opinion building* persoalan-persoalan politik yang ada di Indonesia sebagaimana dituturkan Irfan Abdul Mu’thi,

“Saya Bu, inginnya Indonesia bisa lebih baik. Tidak ada lagi korupsi, tidak ada huru-hara, konflik yang terus-terusan. Nah, harusnya media massa kan bisa menjadi salah satu tempat untuk masyarakat menyampaikan keinginannya. Sehingga bisa didengar pemerintah. Nah, kalo medianya disetir partai tertentu, mana mungkin masyarakat bisa mendapatkan berita yang sesungguhnya...paling-paling yang disampaikan cuma yang baik-baik aja Bu, yang bisa menaikkan pamor partai itu.” (Irfan Abdul Mu’thi, *Wawancara*, 2 Desember 2013)

Kecenderungan untuk berpindah partai dalam rangka mencari kekuasaan ini kemudian dilakukan dengan cara menggandeng artis sebagai publik figur masyarakat Indonesia, Rahmadsyah mengatakan,

“Coba saja kita amati, bagaimana partai mengambil artis-artis terkenal. Ini kan hanya strategi jangka pendek untuk mendapatkan suara sebesar-besarnya. Artis itu kan figur yang sudah punya nama, jadi meskipun partai nggak melakukan apa-apa, masyarakat sudah kenal dia. Jadi partai nggak usah repot-repot, sudah bisa mendapatkan hasil memuaskan. Ini yang menyebabkan politik kita menjadi tidak karuan. Ada sih artis yang punya ke-

mampuan, tapi lebih banyak yang nggak bisa apa-apa.”
(Rahmadsyah, Wawancara, 15 November 2013)

Model rekrutmen yang menggunakan artis ini juga menjadi salah satu penyebab sistem kaderisasi yang dilakukan partai tidak bisa dilakukan secara efektif. Kader yang telah berkutat lama di internal partai politik seringkali harus “kalah” dengan pendatang baru seperti artis. Hal ini disebabkan ketiadaan modal ekonomi dan sosial yang dimiliki yang berupa popularitas tersebut.

Positioning Ideologi Partai Politik dalam Preferensi Politik Santri

Sebagaimana diketahui, ideologi merupakan hal wajib bagi partai politik, dengan ideologinya, sebuah partai politik akan terlihat bagaimana bentuknya. Dengan adanya pemilihan langsung, baik Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati, maka masyarakat semakin sering terlibat dalam kegiatan politik dalam arti sempit (pemilu). Fenomena yang tampak kemudian adalah posisi ideologi yang dikesampingkan oleh peran ketokohan. Ketokohan kemudian menjadi pertimbangan masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Irfan Abdul Mu'thi,

“Saya memilih bukan karena partainya bu, jadi yang saya lihat pasti orangnya. Kalau orangnya baik, ya saya pilih. Seperti misalnya Dahlan Iskan, atau Jokowi. Jadi saya melihat individunya bu, dari partai manapun dia. saya gak peduli dia dari partai mana, yang penting sreg di hati, ya saya pilih. Percuma bu memilih partai, sekarang ini kan Negara kita butuh orang yang bener-bener amanah, bisa menghilangkan korupsi, amanah. Lha kan percuma kalau kita memilih partai, wong mereka semua sama.”
(Irfan Abdul Mu'thi, Wawancara, 25 Oktober 2013)

Faktor figur yang juga menjadi salah satu alasan dikemukakan oleh Abdullah Rois,

“Kalau saya diharuskan memilih, saya tetap milih orang, bukan partainya.” (Abdullah Rois, Wawancara, 25 Oktober 2013)

Strategisnya posisi figur dalam perilaku memilih santri juga terlihat bagaimana mereka melihat *personality* terutama yang terkait dengan *track record* calon, kapasitas, kapabilitas

yang dimiliki calon lebih menjadi referensi dalam perilaku memilih santri seperti yang diungkapkan oleh Saiful Hadi,

“Kalo saya sih sebenarnya lebih melihat sosok yang dicalonkan partai, bukan partainya. Kalo orangnya baik sih, pasti saya pilih. Kebetulan saja sekarang saya aktif di PKS. Tapi saya tetap lebih mengedepankan orangnya. Kalo orangnya baik tapi gak dicalonkan partai saya, saya tetap memilih orang tersebut. Apalagi kalo saya bener-bener sudah tahu siapa dan bagaimana orangnya. Pasti saya pilih dia. Sekarang lho banyak orang baik, tapi belum tentu mereka ada di satu partai. Nah, tugas kitalah melihat mana orang yang baik dan mana yang tidak baik.” (Saiful Hadi, *Wawancara*, 25 Oktober 2013)

Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana konstruksi berpikir santri dalam preferensi politiknya. Posisinya sebagai aktifis partai tidak serta merta menempatkan pemikirannya bersifat kaku, namun juga tetap ada proses kritisasi yang dilakukan.

Posisi figur yang sangat strategis dalam perilaku memilih juga ditunjukkan oleh Abdullah Rois, bahkan dalam kandidat Presiden. Ia tidak akan memilih apabila kandidat yang diajukkannya, yaitu Mahfudz MD tidak jadi maju,

“Insya Allah sih, saya akan memilih, tapi yah tergantung calon presidennya juga, kalau ada yang sreg, ya saya milih. Kalo gak, ya gak milih. Kalo saya sih akan milih pak Mahfud MD, dia orangnya tegas dan kariernya bagus ketika di MK. Sayangnya memang dukungannya kayaknya kurang ya. Ya mungkin karena dia pake pencitraan ya. Pak Mahfudz kan orangnya alami, gak neko-neko. Saya suka orang yang seperti itu. Selain itu orangnya juga amanah, gak takut apapun kalo dia benar.”

Ada juga statemen yang melihat sosok kandidat yang bersih dan memiliki integritas sebagai alasan untuk menjatuhkan pilihan seperti dikatakan Saiful Hadi,

“Ya saya saat itu sebenarnya awam Bu, saya belum banyak tahu tentang politik, yang saya lihat sebenarnya Gus Sholahnya, bukan Wiranto. Saya lihat Gus Sholah orangnya bersih, berasal dari pesantren dan latar belakang keluarganya kan baik. Jadi, saya

menaruh harapan besar pada beliau. Sayang sekali waktu itu gagal. Ya karena saya memilih berdasarkan figurnya Bu, saya melihat AS Hikam orang pesantren yang pintar, dia punya gagasan tentang bagaimana membangun masyarakat yang baik, jadi saya pilih dia karena ada di dapil saya. Untuk Propinsi dan kota pun juga demikian. Saya memilih mereka berdasarkan orang-orang yang dicalonkan. Untuk tahun depan, saya akan memilih A. Syaikh di DPR Pusat Bu, dia berasal dari PKS. Kebetulan kami satu almamater. Jadi saya sudah tahu bagaimana *track record*nya. Untuk propinsi dan kota, saya belum tahu siapa yang akan saya pilih. Ya, sebenarnya lebih banyak karena saya sudah mengenal dia Bu, orangnya baik, amanah. Kebetulan dia masuk PKS. Jadi saya sudah tahu bagaimana dia, apa yang sudah dilakukan.” (Saiful Hadi, *Wawancara*, 25 Oktober 2013)

Hasil dari wawancara di atas bisa diasumsikan bahwa, tradisi kultur keagamaan Nahdliyin yang kuat juga ada pada Abdullah Rois, namun kondisi keluarga ini juga tidak menjadikannya kaku dalam mengkritisi partai politik yang ada, bahkan tidak membentuk preferensi politik yang sama.

Lingkungan sosiologis, dalam perspektif santri dimaknai sebagai kontribusi positif dalam pemikiran politik mereka namun bukan berarti mematikan kritisisme yang mereka miliki. Lingkungan pesantren, misalnya justru mengkonstruksikan pemikiran egaliter dan ini sangat bermakna dalam membangun kultur politik yang sehat seperti yang disampaikan Misrum,

“Saya sebagai orang yang pernah belajar di Timur Tengah dengan doktrin *Sami’na wa Atho’na* dan menekankan tawadhu’ pada kebijakan yang sudah ditetapkan, namun tetap boleh mengkritisnya, Selain itu, selama di pesantren, kami diberi pemahaman bahwa kami semua ini sama. Meskipun nasabnya berbeda-beda. Ada anak pejabat, anak kyai, tapi begitu masuk gerbang pondok, kami ini semua statusnya sama, tidak ada yang lebih tinggi, jadi punya hak yang sama. Simpan dulu status dan jabatan di rumah. Sehingga kami terbiasa berdiskusi dan ada iklim sehat di sini.” (Misrum, *Wawancara*, 25 Oktober 2013)

Selain itu, lingkungan pondok pesantren juga menjadi bagian integral santri untuk mendapatkan dan membangun persepsi politik tersendiri melalui kedatangan tokoh-tokoh partai politik ke lingkungan mereka.

Upaya kritisasi yang dilakukan oleh santri dalam memaknai ideologi partai politik dan pemosisiannya dalam preferensi politik juga mengalami fenomena menarik ketika pilihan politik yang diambil berbeda preferensi politik *mainstream* seorang santri sebagaimana yang ditunjukkan aktifis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berasal dari keluarga Nahdliyyin, Saiful Hadi,

“Di Bekasi Bu, jadi ceritanya begini Bu, saya waktu kelas 2 Aliyah, saya diajak sebuah Yayasan pendidikan di Bekasi yang dimiliki PKS untuk melakukan *boghro*. Kegiatannya adalah jalan-jalan, tafakkur, tadabbur, yang diadakan di Puncak, kalau di sini sih seperti Malang. Acaranya biasanya pas *weekend* Bu, Sabtu minggu di villa. Di sana kami ngaji, juga ada perkenalan pendampingan, yah pokoknya mendalami Islam deh. Biasanya satu angkatan 50 orang. Saya kan sudah tinggal sedikit kuliahnya, jadi agak sering pulang ke Bekasi. Nah, di Depera Bekasi, saya juga mengikkuti kegiatan Monitoring yang disebut Liqo’. Di PKS, setiap anggota wajib mengikuti Liqo’. Biasanya 7-8 orang. Nah, tiap orang itu akan dikontrol setiap minggunya sama *murobbi* (guru). Setiap minggu *murobbi* mengontrol kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya. Mereka yang awal pasti dikontrol oleh *murobbi*. Nanti kalo udah agak lama, mereka pasti harus dapat anggota baru. Jadi, 7 orang itu nanti pasti punya pengikut, sehingga jumlahnya makin banyak. Contohnya, Bu. Pak Hidayat Nur Wahid itu seorang *murobbi*. Dia pasti punya murid yang harus selalu dikontrol kegiatannya. Nah, anggotanya menyebut Pak Hidayat sebagai *murobbi/guru*. Namun, anggota Pak Hidayat itu juga disebut *murobbi* oleh anggota di bawahnya. Begitu terus Bu sampai ke bawah.” (Saiful Hadi, *Wawancara*, 25 Oktober 2013)

Pilihan politik Saiful Hadi ini sangat menarik untuk diamati, karena kesiapannya untuk berbeda dengan lingkungan sosialnya yang warga NU seperti yang dikatakannya,

“Orang tua saya sih Bu, sebenarnya tokoh masyarakat Bu, beliau orang NU tulen, mereka semua alumni Tebuireng Bu. Jadi ya pasti orang NU lah Bu. Sebenarnya banyak yang mengatakan seperti ini. Saya orang pesantren kok malah milih PKS. Teman-teman saya malah bilang, kalo PKS itu haram karena menyebarkan paham wahabi di Indonesia. Mereka juga bilang kalo PKS itu terlalu saklek. Harusnya kalau saya orang NU, ya jangan masuk PKS. Boleh partai lain, tapi jangan PKS. Tapi, gimana ya Bu, saya kok sreg dengan PKS. Yah, kalau orang NU kan demokratis Bu, ayah dan ibu saya sama sekali tidak melarang, mereka justru membebaskan saya menentukan jalan hidup saya, yang resah kan justru keluarga besar saya Bu, karena mereka sama dengan teman-teman. Orang NU kok masuk PKS. Ini kan aneh buat mereka.” (Saiful Hadi, *Wawancara*, 25 Oktober 2013)

Pilihan terhadap partai politik ini tentu saja dibangun dengan argumentasi rasional yang tetap dipertahankan meskipun banyak tentangan dari *insider*-nya dan kemudian dikomunikasikan dengan konstruksi logis seperti yang disampaikan Saiful Hadi,

“Ya, mereka khawatir saya jadi orang yang kaku, padahal orang NU itu kan biasanya akomodatif, tolerir. Jadi kalau saya masuk PKS, mereka khawatir saya terjerumus. Tapi ya saya tetap melihat PKS baik, yang saya suka ya sistem kaderisasinya itu. Ya saya gak peduli dengan kekhawatiran orang lain, saya kan lama di pesantren. Pendidikan saya sekarang juga memberi saya pemahaman yang banyak tentang syariat Islam. Islam tidak sekaku yang dibayangkan orang lain. Tetap harus dilihat bagaimana perkembangan zaman. Saya sampai sekarang tetap menjalankan agama seperti orang NU kebanyakan. Jadi, kan gak perlu dikhawatirkan gimana-gimana ke depannya.” (Saiful Hadi, *Wawancara*, 25 Oktober 2013)

Pilihan politik Saiful Hadi ini jelas berbeda dengan pilihan politik orang tuanya, sebagaimana dia ungkapkan,

“Bapak saya simpatisan NU Bu, beliau juga simpatisan PKB, meskipun tidak termasuk pengurus. Mereka kan melihat kalo PKB itu didirikan oleh kyai-kyai besar NU. Yah, sebagai salah satu santrinya, bapak saya melihat harus *sami'na wa atho'na* dengan kyai-kyai tersebut. Makanya dulu, bapak saya sampai

membeli banyak kaos dengan uangnya sendiri, terus dibagi-bagikan pada pemuda. Itu kan bentuk kecintaan bapak saya pada partai yang banyak didirikan oleh Kyai besar. Tapi setelah PKB pecah kongsi menjadi PKB Gus Dur dan PKB Muhaimin, bapak saya jadi gak simpatik lagi. Bapak saya sangat gak simpatik Bu sama PKB-nya Muhaimin. Menurut mereka orang yang baik itu adalah orang yang bisa menghargai dan menghormati para pendahulunya, bukan orang yang tidak mengakui pendahulunya. Orang-orang di PKB-nya Muhaimin kok seperti melupakan pendahulunya, Kyai-kyai besar yang sudah menyumbang banyak hal pada bangsa kita.” (Saiful Hadi, *Wawancara*, 25 Oktober 2013)

Apabila ditelusuri lebih dalam, konstruksi pemaknaan Saiful Hadi untuk memilih PKS didasarkan pada *performance* partai politik. Dalam hal ini PKS, di lingkungan terdekatnya sehingga membangun persepsi positif pada dirinya dan menjadi referensi dalam preferensi politiknya. Hal ini disampaikan Saiful Hadi,

“Ya, betul sekali Bu. Ini yang saya suka, jadi PKS benar-benar melakukan kaderisasi bu, sampai ke tingkatan paling bawah, kader tuh bener-bener diurusin. Di level bawah, saya lihat PKS sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Di tempat saya, PKS partai mayoritas setelah demokrat. Jadi termasuk partai besar. Anggota DPRnya, di masa reses maupun tidak reses, mereka tetap mengunjungi masyarakat. Mereka tetap aktif dan dekat dengan masyarakat. Nggak hanya hal-hal besar yang dilakukan. Mereka juga melakukan hal-hal yang kecil. Di Dapil saya, PKS menang, jadi daerah saya diprioritaskan. Jalan-jalan semuanya mulus, kalau ada kerusakan, segera diperbaiki. Pokoknya, daerah saya diutamakan lah. Beda dengan daerah lain yang jalannya gak mulus. Jadi, PKS memperhatikan betul kebutuhan kami. Ini yang saya suka.” (Saiful Hadi, *Wawancara*, 25 Oktober 2013)

Namun, sebagaimana kader partai pada umumnya, ideologi partai politik yang dimiliki PKS juga tidak menjadi alasan sepenuhnya Saiful Hadi untuk menentukan pilihan-pilihan politiknya, terutama dalam Pemilu 2014 nanti dan ini menunjukkan bahwa faktor figur masih menjadi alasan utama

preferensi politik santri untuk pemilu 2014 seperti diungkap Saiful Hadi,

“Kalo saya sih sebenarnya lebih melihat sosok yang dicalonkan partai, bukan partainya. Kalo orangnya baik sih, pasti saya pilih. Kebetulan saja sekarang saya aktif di PKS. Tapi saya tetap lebih mengedepankan orangnya. Kalo orangnya baik tapi gak dicalonkan partai saya, saya tetap memilih orang tersebut. Apalagi kalo saya bener-bener sudah tahu siapa dan bagaimana orangnya. Pasti saya pilih dia. Sekarang lho banyak orang baik, tapi belum tentu mereka ada di satu partai. Nah, tugas kitalah melihat mana orang yang baik dan mana yang tidak baik. Sedikit banyak sih iya. Tapi begini lho, bukan berarti karena saya santri, terus saya milih santri juga. Kalo santri yang nyaleg itu gak baik, , saya pasti gak akan milih dia. Sekarang ini, banyak santri yang baik, tapi ada juga yang gak baik. Jadi, saya tetap menimbang-nimbang.” (Saiful Hadi, *Wawancara*, 25 Oktober 2013)

Alasan ini pula yang disampaikan Abdullah Rois,

“Saya memilih bukan karena partainya Bu, jadi yang saya lihat pasti orangnya. Kalau orangnya baik, ya saya pilih. Seperti misalnya Dahlan Iskan, atau Jokowi. Jadi saya melihat individu nya Buk, dari partai manapun dia. Saya gak peduli dia dari partai mana, yang penting sreg di hati, ya saya pilih. Percuma memilih partai, sekarang ini kan negara kita butuh orang yang bener-bener amanah, bisa menghilangkan korupsi, amanah. Lha kan percuma kalau kita memilih partai, wong mereka semua sama. Ya saya melihat orang-orang itu baik, punya kerja yang nyata, tidak sekedar ngomong bokis (bohong) dan NATO (*no action talk only*).” (Abdullah Rois, *Wawancara*, 25 Oktober 2013)

Peran ideologi dalam preferensi politik juga terlihat sangat lemah dalam preferensi politik santri karena prioritas utama referensi santri dalam preferensi politiknya adalah pada faktor figur atau ketokohan kandidat dibandingkan ideologi partai. Sehingga apabila seorang tokoh yang dipersepsikan baik oleh santri ternyata dicalonkan oleh partai non agama, hal ini tidak menjadi kendala sama sekali sebagaimana ungkapan,

“Gak masalah, yang penting orang tersebut baik menurut saya.” (Irfan Abdul Mu’thi, *Wawancara*, 2 Desember 2013)

Pemaknaan santri terhadap kompleksitas persoalan bangsa yang harus segera diselesaikan dengan cara memilih orang atau pejabat yang *capable* dan memiliki integritas baik adalah hal yang menjadi benang merah sehingga preferensi politik lebih banyak diambil untuk mewujudkan mimpi sebagai bangsa yang besar, bebas dari korupsi dan segera keluar dari keterpurukan yang ada.

Rasionalitas Pemilih: Sebuah Pergeseran Perilaku Memilih Santri

Perilaku rasional pemilih sangat terkait dengan informasi yang diperoleh pemilih, dan informasi ini sangat berkaitan dengan penyebaran informasi. Informasi tersebut dapat menyebar ke pemilih lewat berbagai media, terutama televisi. Iklan politik oleh partai bisa menjadi informasi yang bisa dipercaya bila iklan tersebut memuat substansi yang sesuai dengan akal sehat, misalnya didukung oleh fakta. Begitu pula dengan konstruksi berpikir santri tentang ideologi partai politik yang juga sangat dipengaruhi media massa. Melalui media, santri berusaha memperoleh informasi yang terkait dengan perkembangan sosial politik dan meng-up-date informasi mengenai persiapan pelaksanaan Pemilu 2014,

“Sudah, saya sudah tahu dari internet, dari Koran. Banyak juga sih partainya ya, tapi saya gak hapal satu-satu.” (Saiful Hadi, Wawancara, 3 November 2013)

Pada era *social media* seperti sekarang, akses santri terhadap media yang ada tidak sebatas itu saja. Twitter, misalnya, juga digunakan oleh santri untuk memperoleh informasi. Seperti dikatakan Misrum,

“Sekarang ini, kan banyak media yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Ketika surat kabar, televisi banyak digunakan oleh politisi yang memiliki modal besar dan menjadi pemilik media tersebut, maka kita juga mesti pinter-pinter memilih media. Kalau Koran kita rasa banyak yang disembunyikan, kita cari informasi dari sumber lain. Saya sering lihat twitter-nya Trio Macan 2000, yang informasinya banyak membantu kita mengetahui sisi lain yang tidak ada di Koran. Bahkan

“mungkin banyak benarnya. Dari situ saya jadi tau oh, begini, oh, begitu.” (Misrum, *Wawancara*, 10 November 2013)

Mary Spillane, seorang konsultan politik mengomentari perkembangan proses pemilu di negara demokrasi dengan pernyataannya, “*Elections are won and lost on imagery.*” Ideologi dan sistem nilai kini sudah ditanggalkan dan dikalahkan oleh popularitas figur. Persuasi politik menjadi bahan olokan hasil-hasil polling popularitas. Tidak hanya kebijakan, para pemimpin juga dipilih dan ditinggalkan atas bentukan opini.

Di dunia popularitas semacam ini, media massa, terutama televisi, menjadi panglimanya. Seymour (1989) mengatakan bahwa televisi kini merupakan bagian yang sudah terintegrasi dari kehidupan politik. Kemampuan televisi untuk menjangkau pemirsanya secara cepat dan luas, mulai dari yang tinggal di apartemen mewah hingga ke pelosok dusun, membuatnya selalu diburu oleh mereka yang hidup dari popularitas.

Oleh karena itu, kandidat pejabat publik harus sangat memperhatikan penampilan dirinya ketika tampil di televisi. Mereka harus secara jeli memperhatikan baju apa yang harus dipakai, bagaimana intonasi kalimat-kalimat pidatonya, bagaimana *style* rambut harus ditata, aksesoris apa yang mesti dipakai atau dilepas untuk memperkuat citra dirinya. Pertimbangan semacam itu pada dasarnya mengarah pada bagaimana citra diri kandidat akan dibangun di hadapan publik. Pembangunan citra diri kandidat tersebut tentunya berdasarkan hasil rekomendasi *market research*; apakah akan dicitrakan sebagai sosok yang cerdas, berwibawa, religius, atau yang lainnya.

Survei preferensi pemilih yang dilakukan LP3ES pada pemilu presiden 2009 lalu, menunjukkan bahwa mayoritas pemilih menentukan pilihannya karena mendapat informasi dari televisi (66,2 persen), sedangkan media lainnya, seperti radio, koran, dan rayuan langsung tim sukses hanya 33,8 persen. Para pemilih Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK), sebanyak 72,7 persen, juga mengakui bahwa mereka

dipengaruhi oleh media televisi dibanding media lain saat menentukan pilihannya. Sementara mereka yang mencoblos Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi hanya 56 persen yang mengakui dipengaruhi oleh media televisi dibanding media lain saat menentukan pilihannya.

Fenomena lainnya, pemilih Indonesia menjadi tampak lebih independen terhadap elite partai politik. Partai politik sudah tidak menjadi referensi utama lagi bagi pemilih. Justru pencitraan diri yang positif yang dibangun melalui media televisi kini menjadi referensi utama bagi pemilih kita. Oleh karena itu, keinginan elite politik tidak selamanya sebangun dengan keinginan para pendukungnya. Masih segar dalam ingatan kita, pada pemilu kemarin elite Partai Golkar dan PPP bersama PDI-P membentuk mesin suara, yakni Koalisi Kebangsaan, untuk memenangkan Megawati-Hasyim. Jajaran pengurus kedua partai politik tersebut dari mulai pusat sampai ke desa kemudian melakukan "sosialisasi" ke massa pendukungnya secara *all out*. Namun, apa dikata, hasil *quick count* LP3ES dan beberapa lembaga lainnya menunjukkan pasangan SBY-JK mengungguli perolehan suara pemilih. Hasil survei mengatakan sebagian besar massa pendukung Partai Golkar dan PPP memercayakan suaranya ke SBY-JK dan mengabaikan imbauan elite politiknya yang mendukung pasangan Megawati-Hasyim.

Persoalannya, apakah pergeseran perilaku pemilih semacam ini sehat bagi perkembangan kehidupan politik Indonesia ke depan? Apabila dilihat dari kacamata partisipasi politik, hal ini tentunya sangat baik. Dengan pemilu langsung, setiap warga negara diberi hak yang sama untuk memilih pemimpin yang mereka sukai. Kehidupan negara tidak lagi hanya ditentukan oleh elite politik, tetapi harus memperhatikan suara orang-orang yang terpinggirkan baik secara ekonomi, sosial, maupun pendidikan.

Kendati demikian, tegaknya negara demokrasi juga membutuhkan kedewasaan pemilih. Seperti yang dikatakan

John Stuart Mill bahwa hanya pemilih yang rasional dan *well informed* yang bisa menjamin demokrasi bisa berjalan dengan baik. Demokrasi bisa menyeleksi pemimpin yang paling bijaksana, paling jujur, dan paling tercerahkan di antara warga negaranya sendiri.

Pemaknaan santri Tebuireng tentang ideologi partai politik memberikan gambaran adanya pergeseran tipologi pemilih. Sebagaimana dipahami, santri selama ini dikenal merupakan pemilih tradisional, yang akan menentukan pilihan politiknya berdasarkan pengaruh sosiologis dalam konsep perilaku memilih. Hal ini diperkuat dengan kondisi Pesantren Tebuireng yang merupakan pesantren NU. Selama ini, dalam klasifikasi kelompok kemasyarakatan, NU biasa dikategorikan sebagai kaum tradisional, yang sangat dipengaruhi ikatan-ikatan primordial dalam preferensi politiknya. Namun, sebagai sebuah lingkaran akibat *performance* partai politik yang belum menampilkan profesionalitasnya dan sebagai akibat tingkat pendidikan yang dimiliki, maka pergeseran perilaku memilih sangat terlihat di lapangan. Para santri akan menentukan pilihannya berdasarkan keinginan hati nurani, program kerja, dan pasangan calon yang visioner atau mempunyai suatu visi yang jelas.

Pada tahap pemilih rasional, sudah selayaknya dibutuhkan media massa, seperti kata Habermas, yang mampu berperan sebagai instrumen atau forum diskusi publik yang mencerahkan, rasional, kritis, dan tidak bias terhadap pembahasan kepentingan umum seperti urusan politik dan kebudayaan. Media yang memberikan edukasi politik, yang menyediakan *platform* untuk diskursus politik publik, memberikan fasilitas untuk mengalirnya opini publik dan umpan baliknya.

Media massa, terutama televisi, tidak hanya memposisikan diri sebagai media *infotainment*. Apabila media massa seperti ini yang dominan, maka yang akan muncul adalah politisi selebritis. Politisi yang selalu sibuk dengan pencitraan diri di

media massa tanpa pernah memikirkan arah perkembangan bermasyarakat dan bernegara.

Bisa diprediksi apabila pada kampanye-kampanye Pilpres 2014 pun hampir tidak ada partai politik yang akan benar-benar fokus menawarkan program kerja yang jelas dengan cara implementasinya. Setiap partai tentu akan menyertakan program dalam berkampanye, tetapi itu sifatnya hanya `kosmetik`. Hanya sebagai pelengkap dalam pencitraan politik. Dengan kondisi pemilih seperti itu, partai secara pragmatis akan menjual figur capres karena demokrasi kita masih demokrasi yang melihat sosok. Oleh karena tahu pemilih itu apatis, partai bisa lebih pragmatis lagi dengan “membeli” suara pemilih melalui praktik “*money politic*”. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengubah praktik kampanye politik yang pragmatis sekaligus mengubah sifat pemilih yang apatis adalah pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan partai politik karena parpol merupakan lembaga utama yang berfungsi memberikan pendidikan politik. Apabila elite sudah dipaksa memberi pendidikan politik kepada masyarakat, nantinya pemilih menjadi lebih rasional dan otomatis akan membentuk pemilu yang lebih berkualitas.

Kondisi ini mempersyaratkan prakondisi yang harus diciptakan, antara lain: *pertama*, memperbaiki pola rekrutmen, kaderisasi, dan pengelolaan sistem keuangan partai. Pola rekrutmen yang digunakan sangat menentukan kualitas individu maupun kekuatan parpol secara kolektif. Di tingkatan kapabilitas individu, pola rekrutmen yang sehat dan fair akan melahirkan anggota parpol yang memiliki visi yang jelas bagi program konkret yang harus disusun. Sehingga mampu mentransfer kebutuhan masyarakat ke dalam setiap kebijakan yang diambil. Tentu sajahal ini bisa terjadi ketika ada peningkatan kemampuan anggota parlemen untuk melakukan negosiasi, *bargaining*, serta kemampuan teknis dalam *legal drafting*. *Kedua*, mengidentifikasi isu-isu populis dan menerjemahkannya ke dalam program konkret partai politik.

Sensitifitas partai politik melihat persoalan di masyarakat adalah referensi bagi partai untuk menyusun program kerja yang disusun berdasarkan asumsi masyarakat, bukan berdasarkan asumsi elite partai saja.

Penutup

Untuk mendorong agar mekanisme kepengurusan dan pengelolaan partai menjadi makin baik, pengaturannya perlu dituangkan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal itu tidak cukup hanya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah Tangga. Adanya organisasi tersebut, tentu dapat dikatakan juga mengandung beberapa kelemahan. Di antaranya ialah bahwa organisasi partai cenderung bersifat oligarkis. Organisasi dan termasuk juga organisasi partai politik kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya di lapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri. Seperti dikemukakan oleh Robert Michels sebagai suatu hukum besi yang berlaku dalam organisasi,

“Organisasilah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya, antara si mandataris dengan si pemberi mandat dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pemberi. Siapa saja yang berbicara tentang organisasi, maka sebenarnya ia berbicara tentang oligarki.”

Untuk mengatasi berbagai potensi buruk partai politik seperti dikemukakan di atas, diperlukan beberapa mekanisme penunjang. *Pertama*, mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan mengenai hal ini sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam anggaran dasar (*constitution of the party*) dan anggaran rumah tangga partai politik bersangkutan yang ditradisikan dalam rangka “*rule of law*”.

Kedua, mekanisme keterbukaan partai melalui mana warga masyarakat di luar partai dapat ikut-serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Partai politik harus dijadikan dan menjadi sarana perjuangan rakyat dalam turut menentukan bekerjanya sistem kenegaraan sesuai aspirasi mereka. Oleh karena itu, pengurus hendaklah berfungsi sebagai pelayan aspirasi dan kepentingan bagi konstituennya.

Ketiga, penyelenggaraan negara yang baik dengan makin meningkatnya kualitas pelayanan publik (*public services*), serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasi kekuasaan dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Dengan adanya pelayanan umum yang baik disertai keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan dan penyelenggara negara lainnya, iklim politik dengan sendirinya akan tumbuh sehat dan juga akan menjadi lahan subur bagi partai politik untuk berkembang secara sehat pula.

Keempat, berkembangnya pers bebas yang semakin profesional dan mendidik. Media pers adalah saluran komunikasi massa yang menjangkau sasaran yang sangat luas. Peranannya dalam demokrasi sangat menentukan. Karena itu, pers dianggap sebagai “*the fourth estate of democracy*”, atau untuk melengkapi istilah “*trias politica*” dari Montesquieu, disebut juga dengan istilah “*quadru politica*”.

Kelima, kuatnya jaminan kebebasan berpikir (*freedom of thought*), dan berekspresi (*freedom of expression*), serta kebebasan untuk berkumpul dan beorganisasi secara damai (*freedom of peaceful assembly and association*). Pada intinya kebebasan dalam peri kehidupan bersama umat manusia itu adalah bermula dari kebebasan

berpikir (*freedom of thought*). Dari kebebasan berpikir itu selanjutnya berkembang prinsip-prinsip “*freedom of belief*”, “*freedom of expression*”, “*freedom of assembly*”, “*freedom of association*”, “*freedom of the press*”, dan sebagainya dan seterusnya. Oleh sebab itu, iklim atau kondisi yang sangat diperlukan bagi dinamika pertumbuhan dan perkembangan partai politik di suatu negara, adalah iklim kebebasan berpikir. Artinya, partai politik yang baik memerlukan lahan sosial untuk tumbuh, yaitu adanya kemerdekaan berpikir di antara sesama warga negara yang akan menyalurkan aspirasi politiknya melalui salah satu saluran yang utama, yaitu partai politik.

Dalam sistem ‘*representative democracy*’, biasa di-mengerti bahwa partisipasi rakyat yang berdaulat terutama disalurkan melalui pemungutan suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan. Mekanisme perwakilan ini dianggap dengan sendirinya efektif untuk maksud menjamin keterwakilan aspirasi atau kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam sistem perwakilan, kedudukan dan peranan partai politik dianggap sangat dominan (Oliver, 2003:35).

Daftar Rujukan

- Astrika, Lusia, 2013. *Intensitas Perpindahan Keanggotaan Partai Politik, Sebuah Tinjauan Sikap dan Norma Subyektif Anggota Partai*, www.libhuk.org, diakses 30 Nopember 2013, Pukul 20.55 WIB
- Bruinessen, Martin, Van, 1994. *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa; Pencarian Wacana Baru* Yogyakarta : LKiS
- Cole, Stephen, 1980. *The Sociological Method: An Introduction to The Science of Sociology*, Chicago: RandMcNally Company
- Crotty, Richard S. Katz&William, 2006. *Handbook of Party Politics*, Sage Publications: London

- Dhakidae, Daniel, 1999. *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program*. Dalam tim Litbang Kompas, *Edisi Pemilihan Umum*. Jakarta: Litbang Kompas
- Firmanzah, 2008. *Mengelola Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor
- Klingeman, Andrea Volkens, Hans Dieter, 2002. *Political Parties in The New Europe*, Luther&Muller-Rommel (eds), Oxford:Oxford University Press.
- Marijan, Kacung, 2010. *Sistem Politik Indonesia “Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana.
- Miller, Jerome Kirk dan Merc L, 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Beverly Hills:Sage Publication
- Moeleong, Lexy J, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya
- Nurjaman, Asep, 2013. *Peta Baru Ideologi Parpol Indonesia*, e journal UMM, www.E.journalumm.ac.id/index.php/...I30_umm_scientific_journal.doc, diunduh 12 April 2013, jam.10.15 WIB.
- Schattscheider, 1942. *Political parties created democracy*, New York: Palgrave Publication
- Sugiono, Muhadi, 2009. *Peta Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2009*, Laporan Penelitian Hibah Riset Fakultas pemilu 2009, tp: Yogyakarta UGM
- Simbolon, Parakitri T, 2006. *Menjadi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Tama
- Syam, Nur, 2005. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS
- Weisberg, Richard G Niemi, Herbert F, 1990. *Controversies in Voting Behavior*, Washington: Quarterly Inc.
- Wilcox, Fransesca Vassalo&Clyde , 2006. *Part is a carrier of Ideas*, Sage Publications: London

Wawancara

- Wawancara dengan Samsul Arifien, Ahad, 3 Nopember 2013, Jam 12.25 WIB.
- Wawancara dengan M.Ali Subhan, Ahad, 3 Nopember 2013, Pukul 13.20 WIB
- Wawancara dengan Saiful Hadi, Senin, 2 Desember 2013, Pukul 08.35 WIB
- Wawancara Abdullah Rois, Ahad, 3 Nopember 2013, Pukul. 10.35 WIB.
- Wawancara dengan Muh Ghiffari, Senin, 11 Nopember 2013, 18.55 WIB.
- Wawancara M. Ali Subhan, Ahad, 3 Nopember 2013, Pukul 13.55 WIB

- Wawancara Misrum, Senin, 2 Desember 2013, Pukul.10.30 WIB
- Wawancara M. Irfan Yusuf, Sabtu, 16 Nopember 2013, Pukul 08.05 WIB.
- Wawancara Irfan Abdul Mu'thi, Jumat, 15 Nopember 2013, Pukul 14.15 WIB
- Wawancara Abdullah Rois, Jum'at, 15 Nopember 2013, Pukul 15.45 WIB
- Wawancara Abdullah Rois, Ahad, 3 Nopember 2013, Pukul 19.30 WIB
- Wawancara M. Irfan Yusuf, Ahad, 2 Desember 2013, 10.35 WIB
- Wawancara Abdullah Rois, Jumat, 15 Nopember 2013, 15.35 WIB
- Wawancara M. Irfan Yusuf, Ahad, 2 Desember 2013, Pukul. 10.35 WIB
- Wawancara, Irfan Abdul Mu'thi, Senin, 2 Desember 2013, Pukul 19.50 WIB
- Wawancara Abdullah Rois, Senin, 2 Desember 2013, Pukul 09.55 WIB
- Wawancara Irfan Abdul Mu'thi, Senin, 2 Desember 2013, Pukul 18.55 WIB
- Wawancara Rahmadsyah, Jumat, 15 Nopember 2013, Pukul 20.15 WIB
- Wawancara Abdullah Rois, Jumat, 25 Oktober 2013. Pukul 19.50 WIB.
- Wawancara Saiful Hadi, Jumat, 25 Oktober 2013. Pukul 20.15 WIB.
- Wawancara Misrum, Senin, 25 Oktober 2013, Pukul 15.30 WIB
- Wawancara Abdullah Rois, Senin, 25 Oktober 2013, Pukul 16.05 WIB
- Wawancara Saiful Hadi, Jumat, 25 Oktober 2013. Pukul 20.15 WIB.
- Wawancara Rahmadsyah, Ahad, 2 Desember 2013, Pukul 13.20 WIB.
- Wawancara Irfan Abdul Mu'thi, Ahad, 2 Desember 2013, Pukul 13.45 WIB
- Wawancara Saiful Hadi, Ahad, 3 Nopember 2013, Pukul 16.30 WIB
- Wawancara Misrum, Ahad, 10 Nopember 2013, Pukul 16.45 WIB
- Wawancara M. Irfan Yusuf, Ahad, 2 Desember 2013, Pukul. 12.35 WIB
- Wawancara, Irfan Abdul Mu'thi, Senin, 2 Desember 2013, Pukul 21.50 WIB
- Wawancara Abdullah Rois, Senin, 2 Desember 2013, Pukul 19.55 WIB
- Wawancara Irfan Abdul Mu'thi, Senin, 2 Desember 2013, Pukul 21.55 WIB
- Wawancara Rahmadsyah, Jumat, 15 Nopember 2013, Pukul 21.15 WIB
- Wawancara Abdullah Rois, Jumat, 25 Oktober 2013. Pukul 21.50 WIB.
- Wawancara Saiful Hadi, Jumat, 25 Oktober 2013. Pukul 22.15 WIB.
- Wawancara Misrum, Senin, 25 Oktober 2013, Pukul 19.30 WIB

Wawancara Abdullah Rois, Senin, 25 Oktober 2013, Pukul 18.05 WIB

Wawancara Saiful Hadi, Jumat, 25 Oktober 2013. Pukul 22.15 WIB.

Wawancara Rahmadsyah, Ahad, 2 Desember 2013, Pukul 18.20 WIB.

Wawancara Irfan Abdul Mu'thi, Ahad, 2 Desember 2013, Pukul 17.45
WIB

Wawancara Saiful Hadi, Ahad, 3 Nopember 2013, Pukul 19.30 WIB

Wawancara Misrum, Ahad, 10 Nopember 2013, Pukul 19.45 WIB